KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN
Jl. Jenderal Sudirman Km.3,5 Palembang
Laman : sumsel.kemenkum.go.id, Pos-el : kanwilsumsel@kemenkum.go.id

Nomor : W.6-PR.04.05-0065 8 Juli 2026
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Laporan Monitoring dan Evaluasi Mandiri (self assessment) Triwulan II Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum
di Jakarta

Dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Capaian Perjanjian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Monitoring dan Evaluasi Mandiri (self assessment) Triwulan II Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak kami haturkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah,

Maju Amintas Siburian

Tembusan:
1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum;
4. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum;
5. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
6. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum;
7. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum;
8. Kepala Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum;
9. Kepala BPSDM Hukum Kementerian Hukum.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN
Jl. Jenderal Sudirman Km.3,5 Palembang
Laman : sumsel.kemenkum.go.id, Pos-el : kanwilsumsel@kemenkum.go.id

LAPORAN
TENTANG
MONITORING DAN EVALUASI MANDIRI (SELF ASSESSMENT) RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2026
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA SELATAN

A. PENDAHULUAN

1. Umum

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa; hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai prestasi manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya.Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas disini bukan sekedar kemampuan menunjukkan uang publik dibelanjakan, akan tetapi juga meliputi kemampuan menunjukan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomies, efisien, dan efektif.

Perwujudan *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan untuk mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, serta sebagai salah satu upaya meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dan untuk memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah. Pemerintahan yang baik akan terwujud apabila penyelenggaraannya menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokratisasi, efisiensi, efektivitas dan penegakan supremasi hukum.

Kementerian Hukum Republik Indonesia memiliki tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang Hukum. Untuk itu, dalam konteks perwujudan visi dan misi serta tujuan Kementerian Hukum, peran dan andil Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan menjadi sangat penting terutama dalam melaksanakan tugas dan fungsi di wilayah. Dalam kondisi demikian, kinerja birokrasi pemerintah yang unggul menjadi suatu keharusan serta selalu menjadi perhatian publik.

Untuk memandu pencapaian visi dan misi serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diperlukan nilai-nilai yang digunakan sebagai pedoman bagi seluruh pegawai Kementerian Hukum, termasuk pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan. Adapun nilai-nilai tersebut adalah PASTI yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, dibutuhkan laporan pertanggungjawaban yang dalam hal ini adalah Laporan Monitoring dan Evaluasi Mandiri (self assessment) atas pelaksanaan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Triwulan II Tahun 2026.

2. Maksud dan Tujuan

1) Mempercepat pelaksanaan implementasi akuntabilitas kinerja organisasi dan akuntabilitas kinerja anggaran, serta pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum;
2) Meningkatkan kualitas dukungan manajemen, pembentukan regulasi, serta pelayanan dan penegakan hukum;
3) Mendorong tercapainya program prioritas nasional di lingkungan Kementerian Hukum;
4) Sebagai implementasi pertanggungjawaban Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan ini adalah capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 Kantor Wilayah selama Tahun 2026.

4. Dasar Hukum

1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembar Negara Nomor 4700);
2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 80);
3) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 10);
4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum Republik Indonesia;
5) Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum;
6) Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomer 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum.
7) Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-4.OT.01.01 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan telah melaksanakan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja. Adapun rincian kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung tercapainya Perjanjian Kinerja pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut.

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA SELATAN TRIWULAN II
TAHUN 2026

No	Sasaran Kegiatan Perubahan	Indikator Kinerja Kegiatan Perubahan	Target	Alokasi Anggaran	Rencana Aksi Triwulan II	Data Dukung
	Sekretariat Jenderal					
1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	1.208.000	• Menindaklanjuti rekomendasi hasil temuan atas laporan keuangan yang belum selesai ditindaklanjuti • Menyampaikan laporan hasil tindak lanjut ke pengawas internal (Inspektorat Jenderal)	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1LD1JpffHO8ur4RuyUTzs12aOTlg7ufrC
2	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,98 Indeks	16.777.804.000	• Melaksanakan Evaluasi Mandiri AKIP oleh Tim Penilai Mandiri Kantor Wilayah • Melaksanakan survei integritas, SPKP dan SPKAK • Melakukan Kerja Sama dengan Mitra Media untuk Peningkatan Citra Positif Kementerian Hukum • Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (IKPA) • Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan • Melaksanakan penyusunan, review, dan monitoring Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar pelayanan • Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja atas Capaian Kinerja Triwulan • Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Kearsipan Triwulan • Menyusun Laporan Kinerja (LKjIP) Kantor Wilayah Tahun 2025 • Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penerapan SPIP • Melaksanakan Pemantauan Manajemen Risiko Satuan Kerja • Melaksanakan Administrasi Kepegawaian • Melaksanakan Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik • Melaksanakan Pembinaan dan Pengelolaan BMN • Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran • Melaksanakan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/12o1hu5ko7I3smPsljfoDrI7j0kd15mXe

					• Melaksanakan Pembayaran Gaji dan Tunjangan, serta Uang Lembur Pegawai • Melaksanakan Peliputan Kehumasan • Melaksanakan Keprotokoleran • Melaksanakan survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layananan Kesekretariatan • Melakukan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran Triwulan I Tahun 2026	
	Total			**16.779.012.000**		
	AHU					
1	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,22 Indeks	961.564.000	• Sosialisasi pelayanan AHU (apostille dan legalisasi); • Melakukan publikasi dan/ atau pameran; dan • Melakukan pengukuran tingkat pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU di wilayah.	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1VZFtMYzxzVGS3POZ6duJR0BjI-wHpaNs
2	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98,20%	787.584.000	• Penyusunan Laporan Penyelesaian pengaduan masyarakat TW II	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/18pOC6QuUi-klk1_tRZJhXQ2OItoe29t5
	Total			**1.749.148.000**		
	KI					
1	Meningkatnya Layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85%	60.000.000	• Melakukan edukasi/ diseminasi terkait pelindungan kekayaan intelektual dan pendampingan pengajuan permohonan layanan kekayaan intelektual di wilayah, yang memuat informasi terkait: a. Jumlah audiens edukasi/ diseminasi di wilayah (dengan salah satu tema prioritas terkait paten dan royalti lagu/musik); b. Jumlah permohonan KI yang diajukan melalui pendampingan wilayah; c. Informasi peningkatan permohonan KI minimal 20% dibanding tahun 2025 pada periode yang sama; d. Melakukan upaya mendorong layanan pasca permohonan KI (berdasarkan pada informasi dashboard KI); e. Mendampingi pengajuan merek	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1KiDa9UyLvaem3jcNpq9cViCIlp94MM81

					kolektif yang berasal dari KDMP (minimal 25%) yang aktif di wilayah masing-masing (data berdasarkan https://merahputih.kop.id/); dan f. Pengajuan permohonan minimal 12% dari potensi IG di wilayah yang telah terinventarisir (terutama kerajinan tangan, kriya dll); • Melaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) atas Layanan KI; dan • Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan layanan kekayaan intelektual di wilayah.	
2	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	31%	364.604.000	• Melaksanakan koordinasi penanganan aduan pelanggaran dengan melibatkan APH apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum yang signifikan atau melakukan koordinasi penyelesaian sengketa KI (mediasi) dengan Direktorat Penegakan Hukum; • Melakukan penanganan aduan pelanggaran kekayaan intelektual; • melakukan sosialisasi dan pendampingan pencegahan/ penanganan pelanggaran kekayaan intelektual; • Melakukan kerjasama pemantauan pengawasan KI dengan instansi terkait; dan • Melaksanakan evaluasi dan pelaporan penegakan hukum KI.	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/18jPdim8jrIpKq9K3PUsdbaXtFVzwpCj4
3	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,5 Level	1.735.798.000	• Rapat persiapan internal terkait pemenuhan data dukung maturitas KI di wilayah; dan • Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait peningkatan dan pemanfaatan KI di wilayah yang memuat laporan terkait: a. Melaksanakan penandatanganan PKS antara Kanwil dan minimal 100% Kab/Kota di Wilayah masing-masing untuk mendorong penyusunan perda KI di wilayah b. Melakukan koordinasi dengan seluruh perguruan tinggi (pada kelas mandiri, utama, madya, dan pratama berdasarkan klasifikasi perguruan tinggi berdasarkan Keputusan Direktur PPM Nomor 0968/C3/DT.05.00/2025) di wilayah masing-masing untuk mendorong penguatan kelembagaan dan optimalisasi layanan Sentra Kekayaan Intelektual sebagai unit pengelola kekayaan intelektual di lingkungan	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1efF_jHX8LpLDMqycAl7DVLjkvRiPYnwZ

					perguruan tinggi; c. Melaksanakan penandatanganan PKS antara kanwil dan perguruan tinggi pada kelas Mandiri dengan ketentuan minimal 50% di masing-masing wilayah; d. Melaksanakan penandatanganan PKS antara Kanwil dan perguruan tinggi pada kelas Utama dengan ketentuan minimal 20% di masing-masing wilayah; e. Melaksanakan penandatanganan PKS antara Kanwil dan perguruan tinggi pada kelas Madya dengan ketentuan minimal 10% di masing-masing wilayah; dan f. Melaksanakan penandatanganan PKS antara Kanwil dan perguruan tinggi pada kelas Pratama dengan ketentuan minimal 10% di masing-masing wilayah.	
	Total			2.160.402.000		
	PP					
1	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	1. Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	35.480.000	• Melaksanakan fasilitasi perencanaan peraturan perundang-undangan di daerah yang meliputi: a. Melakukan pelayanan terhadap fasilitasi perencanaan peraturan perundang-undangan tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota (Prolegda, penyusunan rancangan Perda kumulatif terbuka, dan penyusunan RPerda di luar Prolegda Provinsi,Kabupaten/Kota, Progsun Perkada Provinsi,Kabupaten/Kota); b. Fasilitasi penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah yang diberikan Kanwil Kemenkum kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota; dan c. Menerima konsultasi terkait program legislasi daerah (Prolegda).	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1qAig6FmdzZzzjqMgm51vxBiotFwcr93-
2		2. Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	103.388.000	• Melaksanakan fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah yang meliputi: a. Melaksanakan rapat harmonisasi Ranperda dan Ranperkada; b. Melaksanakan mediasi dan konsultasi Perda dan Perkada; c. Melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait; dan d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka fasilitasi perancangan Perda dan Perkada.	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1qAig6FmdzZzzjqMgm51vxBiotFwcr93-

				138.868.000		
	BPHN					
1	Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	15%	14.659.000	• Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Perda (luring/daring). • Koordinasi/konsultasi dengan pemangku kepentingan untuk mendorong tindak lanjut terhadap hasil analisis dan evaluasi.	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/19TZTSNxgXEAeHjSVsZBQAnDPN_mCiNYN
2	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	89%	640.485.000	• Penandatanganan perjanjian kinerja dan perjanjian pelaksanaan bantuan hukum TA 2026; • Pemberian layanan bantuan hukum (litigasi & nonlitigasi) (Pencapaian kinerja) • Monev kinerja PBH	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1azYK0iQeTakfj9FY-SsQTuzkYPiwfs_1
3	Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	70%	6.344.000	• Sosialisasi pengelolaan dokumen dan informasi hukum kepada anggota JDIHN di wilayah	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1k9kDvW8fWFtMslKxLoa5fSIX_U6IQnFb
4	Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan	11%	93.806.000	• Pelaksanaan pembentukan dan/atau pembinaan pos bantuan hukum di wilayah; • Monitoring dan evaluasi Posbankum di wilayah; dan • Pengumpulan dan penyampaian data permasalahan hukum di wilayah.	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1DOsAm9AAEW28xVq_r2hV0ohKjBNWweEW
	Total			**755.294.000**		
	BSK					
1	Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95,5%	51.534.000	• Penyusunan Proposal/Desain Analisis Kebijakan dalam rangka analisis implementasi atau evaluasi kebijakan (AIEK)	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1HzVxF-Q22-x3mkC7bAFaxvHE4Xk7llha
	Total			**51.534.000**		
				21.634.258.000		

C. HASIL YANG DICAPAI

Hasil yang dicapai dari Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 ini yaitu Kantor Wilayah Sumatera Kementerian Hukum Sumatera Selatan telah merealisasikan kegiatan berdasarkan Perjanjian

Kinerja yang telah dibuat sebelumya. Berikut tabel penilaian capaian rencana aksi yang didapat dari aplikasi e-performance kemenkum .

Keterangan	Kinerja (Renaksi PK)	Kinerja Anggaran (IKPA)	Nilai	Predikat
Triwulan I	**100%**	97,38	88,82	**Baik**
Triwulan II	**100%**	96,55	88,45	**Baik**

Sumber : *https://performance.kemenkumham.go.id/index.php/kinerja/insite/cascading-kinerja*

Tabel Realisasi Capaian dan Anggaran Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan

No	Sasaran Kegiatan Perubahan	Indikator Kinerja Kegiatan Perubahan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi Anggaran	%
	Sekrteariat Jenderal							
1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	100%	100.00%	1.208.000	-	0,00%
2	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,98 Indeks	3,93 Indeks	98.74%	16.777.804.000	9.151.540.488	54,55%
	Total					**16.779.012.000**	**9.151.540.488**	**54,54%**
	AHU							
1	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,22 Indeks	3,23 Indeks	100,31%	961.564.000	411.220.210	42,77%
2	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98,20%	100%	101,83%	787.584.000	144.595.900	18,36%
	Total					**1.749.148.000**	**555.816.110**	**31,78%**
	KI							
1	Meningkatnya Layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85%	100%	117,65%	60,000,000	32.328.560	53,88%
2	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	31%	nihil	100%	364,604,000	115.000.300	31,54%
3	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,5 Level	nihil	100%	1,735,798,000	687.356.911	39,60%
	Total					2,160,402,000	834.685.771	38,64%
	PP							

1	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	1. Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%	35.480.000	25.003.100	70,47%
2		2. Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%	103.388.000	56.000.600	54,17%
	Total					**138.868.000**	**81.003.700**	**58,33%**
	BPHN							
1	Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	15%	80%	533%	14.659.000	8.552.400	28.01%
2	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	89%	52%	58,14%	640.485.000	344.757.000	53,83%
3	Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	70%	100%	142,86%	6.344.000	6.182.150	97,45%
4	Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan	11%	100%	909%	93.806.000	82.740.880	88,20%
	Total					**755.294.000**	**442.232.430**	**58,55%**
	BSK							
1	Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95.5%	100%	104,71%	51.534.000	30.422.435	59,03%
	Total					**69,304,000**	**51.534.000**	**59,03%**
	Jumlah					**21.634.258.000**	**11.095.700.934**	**46,54%**

- **HAMBATAN**

Dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Mandiri (*self assessment*) Triwulan II terhadap Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan telah melaksanakan seluruh rencana aksi secara optimal, baik dalam pencapaian target kinerja maupun pelaksanaan anggaran sampai dengan Triwulan II. Seluruh rencana aksi yang ditetapkan untuk Triwulan II telah terlaksana dengan capaian sebesar **100%**, sebagaimana tercantum pada aplikasi **e-Performance Kementerian Hukum**. Capaian tersebut menunjukkan komitmen Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan dalam melaksanakan langkah-langkah strategis untuk memenuhi target Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Berbagai upaya terus dilakukan agar seluruh indikator kinerja dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaan rencana aksi masih terdapat beberapa kendala. Salah satu hambatan yang dihadapi adalah adanya perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan akibat berbenturannya agenda dengan kegiatan divisi lain. Kondisi tersebut mengakibatkan penyesuaian terhadap jadwal pelaksanaan kegiatan dan berdampak pada ketidaksesuaian antara realisasi dengan rencana penarikan dana yang telah disusun sebelumnya. Selain itu, selama Tahun Anggaran 2026 juga terjadi beberapa kali perubahan pagu anggaran sebagai akibat dari adanya Alokasi Belanja Tambahan (ABT) maupun kebijakan penajaman anggaran yang mengakibatkan pengurangan pagu pada beberapa kegiatan.

Sebagai bentuk pengendalian internal, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan telah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Mandiri Triwulan II atas pelaksanaan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa seluruh unit kerja telah melaksanakan rencana aksi sesuai dengan *timeline* yang ditetapkan untuk Triwulan II. Perubahan jadwal beberapa kegiatan hanya menggeser waktu pelaksanaan pada tingkat bulanan dan tidak memengaruhi pencapaian target kinerja Triwulan II secara keseluruhan. Dengan demikian, target pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tetap dapat dicapai sesuai dengan yang telah direncanakan.

D. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan telah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Triwulan II terhadap pelaksanaan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026 sebagai bagian dari upaya pengendalian dan evaluasi kinerja organisasi. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, seluruh rencana aksi yang ditetapkan pada Triwulan II telah terlaksana sesuai dengan target yang ditentukan dan memperoleh capaian sebesar 100% pada aplikasi e-Performance Kementerian Hukum. Seluruh indikator dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026 yang menjadi target pada Triwulan II juga telah tercapai sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja secara umum telah berjalan dengan baik. Meskipun terdapat beberapa kendala, seperti penyesuaian jadwal kegiatan akibat berbenturannya agenda antarunit kerja serta adanya perubahan pagu anggaran yang disebabkan oleh Alokasi Belanja Tambahan (ABT) dan kebijakan penajaman anggaran, kondisi tersebut tidak memengaruhi pencapaian target kinerja Triwulan II. Berbagai penyesuaian yang dilakukan mampu menjaga efektivitas pelaksanaan rencana aksi sehingga target kinerja dan pelaksanaan anggaran tetap dapat dicapai sesuai dengan yang telah direncanakan.

2. Rekomendasi

Untuk pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026 pada Triwulan II agar kiranya pengampu Rencana Aksi masing-masing bagian menyusun dan memperhatikan pelaksanaan capaian Rencana Aksi sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan ditetapkan. Di samping itu, pemangku kegiatan di setiap bagian untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan anggaran melalui penyelarasan perencanaan kerja dengan anggaran serta kontrol administrasi keuangan. Diperlukan koordinasi yang intensif dengan berbagai *stakeholder* khususnya Unit Eselon I agar dapat mengoptimalkan pelaksanaan Capaian Rencana

Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan.

D. PENUTUP

Laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi mandiri (*Self Assessment*) untuk meningkatkan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan pada tahun-tahun berikutnya berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan sesuai dengan realisasi anggaran. Rencana tindak lanjut pada periode berikutnya yaitu melaksanakan rencana aksi yang telah disusun dengan memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi pada bulan-bulan sebelumnya demi tercapainya tujuan organisasi secara optimal.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Palembang
Pada tanggal 8 Juli 2026
Kepala Kantor Wilayah,

Maju Amintas Siburian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi